

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL
(STUDI KASUS BUMDES KULING KABOI DI DESA BANGA
KECAMATAN MAWASANGKA KABUPATEN BUTON TENGAH)**



Oleh:

ABD. WAHID AL MUBARRAQ HAMKA

NIM: 20200011042

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar *Master of Arts (M.A.)*

Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi Pekerjaan Sosial

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABD. WAHID AL MUBARRAQ HAMKA

NIM : 20200011042

Jenjang : Magister

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic studies*

Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menerangkan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian pribadi kecuali pada bagian bagian tertentu yang dirujuk sebagai sumbernya.

Yogyakarta, 20 Januari 2023

Saya yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



ABD. WAHID AL MUBARRAQ HAMKA
NIM: 20200011042

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABD. WAHID AL MUBARRAQ HAMKA

NIM : 20200011042

Jenjang : Magister

Program Study : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menerangkan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan betul-betul bebas dari plagiasi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa naskah ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Januari 2023

Saya yang menyatakan



ABD. WAHID AL MUBARRAQ HAMKA

NIM: 20200011042



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-243/Un.02/DPPs/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL (STUDI KASUS BUMDES KULING KABOI DI DESA BANGA KECAMATAN MAWASANGKA KABUPATEN BUTON TENGAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABD. WAHID AL MUBARRAQ HAMKA, S.SOS
Nomor Induk Mahasiswa : 20200011042
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Februari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ramadhanita Mustika Sari
SIGNED

Valid ID: 6406e503c1c22



Penguji II

Dr. Muh. Ulil Absor, S.H.I., MA
SIGNED

Valid ID: 640403e5a96c4



Penguji III

Zulkipli Lessy,
S.Ag.,S.Pd.,M.Ag.,M.S.W.,Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 63fc5b85845fa



Yogyakarta, 17 Februari 2023

UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6406edbec6595

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat setelah melakukan bimbingan, arahan juga koreksi
**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL
(STUDI KASUS BUMDES KULING KABOI DI DESA BANGA
KECAMATAN MAWASANGKA KABUPATEN BUTON TENGAH)**
yang ditulis oleh:

Nama : ABD. WAHID AL MUBARRAQ HAMKA, S.Sos
NIM : 20200011042
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Arts*
(*M.A.*).

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Januari 2023
Pembimbing



Dr. Muh. Ulil Absor, S.H.I., MA

ABSTRAK

ABD. WAHID AL MUBARRAQ HAMKA. (20200011042). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sosial – Studi Kasus BUMDes Kuling Kaboi di Desa Banga Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. Tesis, Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Pekerjaan Sosial, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. Salah satu desa terbaik untuk mengelola BUMDes di tingkat Kabupaten Buton Tengah tahun 2020 adalah Desa Banga yang terletak di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes Kuling Kaboi serta efisiensi pengelolaan BUMDes Kuling Kaboi. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif untuk menelaah data yang terkumpul secara mendalam, detail, dan presisi. menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai teknik analisis datanya.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Banga cukup antusias dalam prakarsa pembangunan sosial melalui BUMDes Kuling Kaboi hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan BUMDes, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan program hingga evaluasi, sehingga program berjalan dengan baik dan solid karena ada kerja sama yang baik antara pemerintah desa, pengurus BUMDes Kuling Kaboi dan masyarakat Desa Banga. Efektivitas penyelenggaraan program BUMDes Kuling Kaboi di Desa Banga dalam keterlibatan, adaptasi, misi, dan konsistensi dapat berjalan dengan efektif walaupun peningkatan kompetensi belum dilakukan secara merata kepada semua pengelola BUMDes serta kedepannya dapat meningkatkan pendapatan dalam pengelolaan BUMDes sehingga porsi pembangunan desa bisa lebih besar sehingga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Desa Banga.

***Kata Kunci:* Partisipasi masyarakat, BUMDes, Efektivitas**

MOTTO

‘‘Sebaik-baik manfaat adalah Ilmu yang diamankan, karenanya ku lintasi
ribuan kilometer untuk menuntut ilmu sebagai persembahan bhaktiku
untuk daerah dan negeri ku.’’

(Abd. Wahid Al Mubarraq Hamka)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Drs. HAMKA, M.MPub dan Ibu Sarfiah, S.Pd, yang telah mendidik dan membesarkan penulis sampai saat ini, yang selalu memberi semangat, nasehat serta selalu berkorban banyak hal untuk penulis. Terima kasih banyak karena kalian selalu mendukung dan menjadi semangat buat penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses kedepannya, aamiin ya rabbal alamin.
2. Adik penulis Siti Nur Al Fitrah dan Mustajab Al Mabruur yang selalu menghibur dan memberi semangat.
3. Keluarga besar Alm. Kakek La Turuki dan Almh. Nenek Wa Goha serta Keluarga besar Kakek La Unde dan Nenek Wa Kanu yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan selalu mendoakan penulis.
4. Almamater tercinta Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang menciptakan segala makhluk di dunia ini dengan kebijaksanaan kasih sayang, dan penyelesaian tesis sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program magister (S2) Pascasarjana dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang telah membuka pintu keimanan dan membawa cahaya kebenaran kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister (S2) pada Jurusan Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Pekerjaan Sosial Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyelesaian tesis ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih pada semua pihak yang dengan ikhlas memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A, selaku Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Program magister (S2) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Muh. Ulil Absor, S.H.I., M.A, selaku dosen pembimbing yang selalu senantiasa sabar dalam memberikan motivasi, arahan, dan ilmu serta penuh dengan ketulusan dalam membimbing saya, hingga saya dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.
5. Ibu Dr. Ramadhanita Mustika Sari. selaku pembimbing akademik saya yang senantiasa memberikan arahan seputar akademik dan juga nasehat serta solusi dalam menjalankan studi akademik saya.
6. Bapak dan ibu dosen pascasarjana dan seluruh staf program studi Interdisciplinary Islamic studies yang telah memberikan curahan ilmu pengetahuan yang begitu bermanfaat dan mengedukasi.
7. Segenap civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
8. Teristimewa penulis ucapkan kepada ayah tercinta Drs. Hamka, M.MPub. dan ibu Sarfiah, S.Pd., yang senantiasa mendidik, membesarkan, mencurahkan kasih sayang serta mendoakan, memotivasi dan membiayai pendidikan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
9. Adikku tercinta Siti Nur Al Fitrah dan Mustajab Al Mabruur, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa-doanya kepada penulis sehingga proses penyelesaian studi dapat berjalan dengan lancar
10. Seluruh keluarga besar penulis yang telah membantu penulis dalam memberikan do'a, semangat dan dukungan baik secara moril maupun materi, sehingga penulis dapat memperoleh gelar magister.

11. Teman-teman seperjuangan konsentrasi pekerjaan sosial yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat kepada penulis.
12. Teman-teman Kammbaka Jogja yang selalu memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis.
13. Kepada seluruh informan dalam penelitian, maupun para partisipan yang telah meluangkan waktunya dan selalu mendukung dalam memberikan informasi dalam penelitian ini.
14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan secara satu persatu, semoga jasa yang diberikan dapat menjadi amal baik dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Yogyakarta, 20 Januari 2023

Penulis



ABD. WAHID AL MUBARRAQ HAMKA
NIM: 20200011042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teoritis	15
1. Teori Partisipasi	15
a. Pengertian Partisipasi Masyarakat	16
b. Manfaat Partisipasi Masyarakat	19
c. Proses Partisipasi.....	20
2. Teori Efektivitas Organisasi	24
F. Metodologi Penelitian	28

1. Jenis Penelitian	28
2. Lokasi Penelitian.....	29
3. Subjek Penelitian	29
4. Teknik Penentuan Informan.....	30
5. Teknik Pengumpulan Data.....	31
6. Teknik Analisis Data	33
7. Keabsahan Data	35
G. Sistematika Pembahasan	36
BAB II DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	37
A. Profil Desa Banga Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah.37	
1. Sejarah Desa	37
2. Kondisi Geografis	39
3. Demografi/Kependudukan.....	40
4. Pendidikan	41
5. Mata Pencaharian.....	42
6. Aspek-aspek Sosial Budaya.....	43
7. Kondisi Pemerintahan Desa.....	43
B. Profil BUMDes “Kuling Kaboi” Desa Banga Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah.....	45
1. Sejarah BUMDes Kuling Kaboi	45
2. Struktur Pengurus BUMDes Kuling Kaboi	47
3. Visi Misi BUMDes Kuling Kaboi	50
4. Jenis-jenis Usaha yang dikembangkan BUMDes Kuling Kaboi	50

5. Pendapatan dan Pembagian Hasil Usaha BUMDes Kuling Kaboi..	54
6. Kekurangan dan Kelebihan BUMDes Kuling Kaboi	55
7. Rencana Tindak Lanjut Penguatan BUMDes Kuling Kaboi	57
BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT DAN EFEKTIVITAS	
PENYELENGGARAAN PROGRAM BUMDES KULING KABOI.....	58
A. Proses Partisipasi Masyarakat di Desa Banga Dalam Program BUMDes	
Kuling Kaboi	58
1. Partisipasi Masyarakat pada Perencanaan Program BUMDes Kuling	
Kaboi di Desa Banga	59
2. Partisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan Program BUMDes Kuling	
Kaboi di Desa Banga	69
3. Partisipasi Masyarakat pada Evaluasi.....	75
B. Efektivitas Penyelenggaraan Program BUMDes Kuling Kaboi	79
1. Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan BUMDes.....	79
2. Adaptasi BUMDes terhadap Persaingan Jenis Usaha.....	81
3. Misi BUMDes Kuling Kaboi dalam Pembangunan Desa Banga	83
4. Konsistensi Pengurus BUMDes dalam Menjalankan Usaha.....	85
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	97
PROFIL PENULIS	108

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Daftar Informan Penelitian
- Tabel 2.1 Kegiatan Pembangunan Desa
- Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun
- Tabel 2.3 Tingkat Pendidikan
- Tabel 2.4 Jenis Mata Pencaharian Desa Banga
- Tabel 2.5 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Banga
- Tabel 2.6 Struktur Organisasi Pengurus BUMDes Kuling Kaboi
- Tabel 2.7 Pendapatan dan Pembagian Hasil Usaha BUMDes Kuling Kaboi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk mengembangkan ekonomi lokal berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal. BUMDes merupakan alat penunjang kegiatan ekonomi di desa yang dipandang sebagai fungsi lembaga sosial dan usaha komersial (lembaga niaga).¹

UU No 32 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa menjadi dasar kriteria pendirian BUMDes. Potensi BUMDes sebagai badan usaha yang berdiri sendiri bagi masyarakat pedesaan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.²

Desa mandiri merupakan desa yang maju dengan kapabilitas melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dengan kekuatan ekonomi dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Selain kuat secara ekonomi dan sosial, Desa mandiri merupakan desa yang menawarkan keamanan, ketentraman dan kenyamanan bagi masyarakat. Membangun desa mandiri berarti mengimplementasikan peta jalan “Membangun

¹ Departemen pendidikan nasional pusat kajian dinamika sistem pembangunan, *Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2017): 3.

² Zulkarnain Ridwan, “Payung Hukum Pembentukan BUMDes,” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (September 2013): 356.

Desa” dalam UU Desa dan Nawa Cita. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mendorong munculnya warga yang kritis, peduli, dan dinamis dalam proses pembangunan desa. Kemudian kedua, menjalankan sistem perencanaan dan penganggaran desa yang partisipatif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan batas kewenangannya. Terakhir, mendukung keberhasilan desa mandiri dengan menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pelaksanaan anggaran desa yang partisipatif, teratur, efisien, efektif, dan baik.³

Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 (UU Desa), adalah untuk menjawab pertanyaan tentang percepatan pembangunan desa. Kebijakan nasional penguatan desa yang demokratis, mandiri, dan kuat sebagai landasan yang kokoh bagi kemakmuran dan keadilan disambut dengan antusias oleh semua pihak. Menawarkan dana desa langsung dari APBN adalah salah satu strategi untuk melakukannya. Besaran subsidi desa terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan Rp 20,7 triliun pada 2015, 46,98 triliun pada 2016, 60 triliun pada 2017 dan 2018, dan 70 triliun pada 2019 menurut informasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam buku “Menuju Desa Mandiri”. Dana desa dipantau oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar dapat digunakan secara efektif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.⁴ Pembangunan infrastruktur desa setempat, peningkatan layanan sosial mendasar, dan perluasan ekonomi desa adalah semua kemungkinan

³ Borni Kurniawan, *Buku Desa Mandiri, Desa Membangun* (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015).

⁴ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Kementerian Keuangan tentang Dana Desa, 2015).

penggunaan dana desa.⁵

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu cara pembangunan nasional. Sesuai dengan potensi desa, badan usaha atau lembaga ekonomi yang ada di desa didirikan atas prakarsa masyarakat oleh pemerintah desa. Landasan hukum pertama lahirnya peraturan daerah tentang pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah Undang-Undang Pemerintahan Desa Nomor 32 Tahun 2004. Kemudian, undang-undang desa no. 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa BUMDes didirikan dengan maksud untuk mendukung perekonomian desa, mempererat tali kekeluargaan, dan bergotong royong untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan kebutuhan, peluang, dan kemampuan desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan, BUMDes didirikan sebagai langkah dalam pembangunan ekonomi lokal pedesaan. Sebagai sebuah desa, perkembangan ekonomi BUMDes mutlak membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan dan pertumbuhannya.⁶

Tentu saja pembangunan tidak lepas dari peran serta anggota masyarakat. Nasution (2009) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat merupakan syarat utama keberhasilan pembangunan pedesaan. Masyarakat desa merupakan bagian yang paling memahami keadaan wilayahnya, tentunya dapat memberikan kontribusi yang sangat berharga. Masyarakat desa merupakan modal pembangunan

⁵ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, No 4 Tahun 2015.

⁶ Rahmat Ageng Minanto, Pudji Muljono dan Ahmad, "Peran Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Program BUMDes "Karya Bahari" (Kasus: Desa Dasun Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Jawa Tengah)," *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat* 3, no. 3 (2019).

yang sangat besar dengan pengalaman dan pengetahuannya. Dalam hal ini partisipasi/keterlibatan masyarakat dalam BUMDes harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan..⁷

Dalam pembangunan, peran masyarakat sangat penting, karena masyarakat itu sendiri merupakan obyek dan subyek pembangunan. Dengan kata lain, Warga dilibatkan dalam pembangunan sekaligus objek ataupun tujuan pembangunan. Partisipasi warga dalam penerapan pembangunan sangat berarti sebab menjamin produk yang dikembangkan bisa memenuhi kebutuhan warga. Pembangunan perkotaan serta pedesaan mutlak memerlukan cara yang berbeda. berkaitan dengan hal itu, pembangunan dengan dana BUMDes yang berbasis potensi lokal membutuhkan partisipasi langsung warga desa.⁸

Kessa (2015) mendefinisikan pembangunan partisipatif adalah sistem pengelolaan pembangunan desa serta pedesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa yang mengutamakan asas kekeluargaan gotong-royong, serta kebersamaan dalam menggapai keadilan sosial serta perdamaian. dengan demikian menjadi jelas jika warga memang dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sedangkan tanggung jawab pemerintah desa agar pembangunan desa berjalan dengan baik dengan mengkoordinasikannya melalui BUMDes.⁹

Perencanaan pembangunan yang partisipatif, terbuka, akuntabel, dan

⁷ *Ibid.* 1.

⁸ Ratna Azis Prasetyo, "Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro," *Jurnal Dialektika* XI, no. 1 (March 2016).

⁹ *Ibid.* 88.

mendalam merupakan komponen pembangunan desa yang mandiri. Kreativitas dalam segala aspek usaha BUMDes merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mewujudkan desa tersendiri. Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kekayaan dan kemampuan setiap desa penting untuk dimaksimalkan.¹⁰

Sasaran pencapaian kemandirian desa ada tiga yaitu: (a) potensi atau kapabilitas ekonomi, (b) potensi masyarakat, dan (c) potensi sumber daya manusia. Pengelolaan BUMDes harus kreatif berwirausaha karena potensi ekonomi merupakan komponen terpenting dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mengetahui bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pengembangan bisnis BUMDes salah satunya. Potensi sosial adalah ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan dan kualifikasi dari masyarakat pedesaan di berbagai sektor BUMDes untuk memberdayakan dan melibatkan masyarakat dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Potensi sumber daya manusia untuk berperan sebagai pendukung dalam mengarahkan BUMDes ke arah yang lebih profesional, mentransformasikan BUMDes menjadi lembaga usaha yang kreatif produktif, fleksibel dan akuntabel.¹¹

Prinsip budaya gotong royong dan kebersamaan yang diikuti dengan semangat kekeluargaan dalam kegiatan sosial seperti pelibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes, melakukan pengabdian masyarakat setiap hari Jum'at, serta

¹⁰ Irfan Nursetiawan, "Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDes" (FISIP Universitas Galuh: Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, 2018).

¹¹ *Ibid.* 79-80.

menghadiri dan ikut membantu acara pernikahan, pemakaman, dan acara sosial lainnya, menunjukkan keunikan masyarakat Desa Banga.¹² Hal ini sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyebutkan bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah untuk mengembangkan usaha, membangun desa, memperkuat desa, dan membantu masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan pendapatan tetap serta anggaran belanja desa. Alhasil, banyak BUMDes yang justru diarahkan untuk menyediakan dana bergulir.

Salah satu desa terbaik di Kabupaten Buton Tengah untuk mengelola BUMDes tahun 2020 adalah Desa Banga yang berada di Kecamatan Mawasangka. Dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Tengah disebutkan sebagai berikut: Tentang pemilihan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbaik di tingkat Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020, Nomor 429.011/ 227/2020. Kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), dedikasi pengurus BUMDes Kuling Kaboi dan Pemerintah Desa Banga terhadap pembangunan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan keterbukaan laporan keuangan BUMDes atau tertib administrasi merupakan indikator yang dinilai dalam penentuan BUMDes terbaik di tingkatan kabupaten.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk memperluas subjek penelitian "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sosial (Studi Kasus

¹² Wawancara awal dengan bapak RN selaku Kepala Desa Banga.

¹³ Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Badan Usaha Milik Desa Terbaik Tingkat Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020.

BUMDes ‘‘Kuling Kaboi’’ di Desa Banga Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes *Kuling Kaboi* di Desa Banga Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah?
2. Bagaimana efektivitas penyelenggaraan program BUMDes *Kuling Kaboi* Desa Banga Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengarahkan pelaksanaan dan mengungkap permasalahan yang dibahas pada pembahasan pendahuluan, perlu dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut ini:

- a. Mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes *Kuling Kaboi* di Desa Banga.
- b. Mengetahui dan menganalisis efektivitas penyelenggaraan program BUMDes *Kuling Kaboi* di Desa Banga.

2. Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa potensi manfaat dari penelitian ini untuk memperluas pemahaman tentang BUMDes:

- a. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan

tambahan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan pekerjaan sosial dan pembangunan ekonomi pedesaan melalui lembaga BUMDes.

- b. Secara Praktis; pemerintah Desa Banga dan manajemen BUMDes akan mendapatkan manfaat dari kontribusi praktis penelitian ini untuk pembuatan kebijakan dan pengembangan usaha, yang akan membantu memperkuat pelaksanaan program BUMDes di masa mendatang.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dilakukan, untuk mengetahui beberapa hasil penelitian sebelumnya serta fokus penelitian yang terkait dengan penelitian ini perlu dikemukakan dan juga untuk menghindari duplikasi hasil serta untuk menjelaskan pentingnya penelitian peneliti kerjakan. Beberapa penelitian, diantaranya:

1. Partisipasi Masyarakat

Kajian pertama bertajuk “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan (PNPM-MP) di Desa Bligo Kabupaten Sidoarjo*” dilakukan oleh Rahayu Kristiniati dan Ilmi Usrotin Choiriyah. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM-MP cukup baik dan berhasil, menurut temuan penelitian ini. karena tahap partisipatif yang meliputi tahap pemeliharaan, tahapan pengawasan/pemantauan dan tahapan mengevaluasi, serta pemanfaatan hasil pembangunan dijalankan dengan tepat. Namun, fase pengambilan keputusan

dan implementasi masih membutuhkan perbaikan. Ada beberapa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Komitmen kepala desa, keterlibatan lembaga swadaya masyarakat, komitmen aktor, dan dukungan stakeholder menjadi faktor pendukung. Sementara itu, ketiadaan pengawas aktif unit pengelola keuangan menyebabkan lambatnya pengembalian dana bergulir ke kedua kelompok swadaya tersebut dan partisipasi masyarakat yang tidak merata di semua kegiatan.¹⁴

Kajian kedua berjudul "*Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang*" Penelitian dilakukan oleh Adam Latif, Irwan, Muhammad Rusdi, Ahmad Mustanir, dan Muh Sutrisno. Dengan persentase sebesar 78,65 persen, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, dan Kabupaten Sidenreng Rappang cukup baik. Partisipasi masyarakat dalam musrenbang, atau partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, merupakan indikator dengan skor tertinggi. Dengan 82,42 persen, pembangunan infrastruktur dinilai memuaskan di Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, dan Kabupaten Sidenreng Rappang. Pembangunan jalan pertanian (infrastruktur aksesibilitas) merupakan indikator dengan skor

¹⁴ Rahayu Kristiniati Dan Ilmi Usrotin Choiriyah, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Di Desa Bligo Kabupaten Sidoarjo," *JKMP (ISSN. 2338-445X)* 2, no 2 (September 2014): 103–220.

tertinggi. Dengan persentase 80,25 persen, partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, dan Kabupaten Sidenreng Rappang dinilai sangat baik.¹⁵

Kajian ketiga berjudul “*Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*” dilakukan oleh Ricky Wirawan, Mardiyono, dan Ratih Nurpratiwi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat kecamatan Dusun Selatan terlibat aktif dalam kegiatan musrenbang. Hal ini menunjukkan bahwa warga kecamatan Dusun Selatan telah diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun, pemerintah menentukan hasil dari proses perencanaan berdasarkan program prioritas daerah, dan usulan kegiatan program yang tidak dilaksanakan tahun ini akan dilaksanakan tahun berikutnya. Melalui sistem online, petugas kecamatan Dusun Selatan memfasilitasi kemudahan peserta. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Hal ini menunjukkan adanya birokrasi yang adaptif terhadap kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.¹⁶

Kajian keempat penelitian oleh Sharul Syamsi “*Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Penggunaan Anggaran Dana Desa,*” Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Wakan dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang dibiayai oleh anggaran dana desa melalui tiga cara

¹⁵ Adam Latif, Irwan, Muhammad Rusdi, Ahmad Mustanir, Muh Sutrisno, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang,” *Jurnal MODERAT* 5, no. 1 (Februari 2019): 1–15.

¹⁶ Ricky Wirawan, Mardiyono dan Ratih Nurpratiwi, “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4, no. 2 (2015).

yaitu melalui pelaksanaan rencana pembangunan yang dikenal dengan musrenbang, pelaksanaan program atau pelaksanaan program, dan pengawasan atau pemantauan program yang dibiayai oleh anggaran dana desa. . Berdasarkan ketiga sudut pandang tersebut, keterlibatan masyarakat dapat berupa: gagasan, tenaga kerja, fasilitas atau peralatan, dan keahlian atau keterampilan dalam bidang tertentu. Di Desa Wakan, pengelolaan pengeluaran anggaran dana desa dibagi menjadi tiga bagian: ADDr, ADDp, dan ADDk; Namun, administrasinya masih lemah akibat pengambilan keputusan yang ceroboh, kurangnya transparansi anggaran, dan kurangnya tanggung jawab dalam mengelola anggaran dana desa itu sendiri.¹⁷

Kajian kelima berjudul “*Modal Sosial dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Tamansari di Kabupaten Banyuwangi*” dilakukan oleh Eka Puspitaningrum dan Djuara P. Lubis. Kepemilikan modal sosial masyarakat tinggi, menurut temuan penelitian. Hal ini karena masyarakat dan pihak lain memiliki banyak kepercayaan satu sama lain, masyarakat memiliki aturan yang ketat tentang bagaimana membangun hubungan yang baik satu sama lain, dan Desa Tamansari dibangun untuk pariwisata yang membantu masyarakat. Faktor yang memotivasi partisipasi termasuk dalam kategori tinggi. Masyarakat dapat, memiliki kesempatan, dan mau berpartisipasi dalam pertumbuhan desa wisata. Masyarakat memiliki tingkat keterlibatan sedang, namun kurang terlibat dalam tahap perencanaan

¹⁷ Syahrul Syamsi, “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (ISSN. 2442-6962)* 3, no. 1 (2014).

dan pemantauan. Tingkat keterlibatan masyarakat pada tahap pelaksanaan sangat tinggi, dan masyarakat sangat antusias menjadikan Desa Tamansari sebagai destinasi wisata.¹⁸

2. Efektivitas penyelenggaraan program BUMDes.

Kajian pertama berjudul “*Efektivitas Pengelolaan BUMDes Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang*” dilakukan oleh Hanny Purnamasari, Eka Yulyana, dan Rachmat Ramdani. Studi ini mengungkapkan bahwa masyarakat desa kurang memiliki pengetahuan tentang pendirian BUMDes dan pemerintah Desa Warungbambu kekurangan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengelola dan mempertahankan perekonomian. Masih belum efektif dan efisien dalam mencapai tujuan efisiensi pengelolaan BUMDes. Untuk mendirikan BUMDes, pemerintah desa membentuk musyawarah, namun hanya mengikutsertakan kepala dusun dan tidak mengikutsertakan seluruh masyarakat desa. Masyarakat desa tidak mengetahui tahapan-tahapan dalam pendirian BUMDes yang berdampak pada bagaimana pengelolaan BUMDes dilaksanakan dan menimbulkan perselisihan dan perpecahan baru di dalam masyarakat.¹⁹

Kajian kedua berjudul “*Efektivitas Organisasi Pemerintah Kecamatan*

¹⁸ Eka Puspitaningrum dan Djuara P. Lubis, “Modal Sosial Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Wisata Tamansari di Kabupaten Banyuwangi,” *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat* 2, (4) (2018): 465–484.

¹⁹ Hanny Purnamasari, Eka Yulyana, Rachmat Ramdani, “Efektivitas Pengelolaan BUMDes Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desawarung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang,” *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2016.

Wanea Kota Manado” dilakukan oleh Vicky Switly Toad, Joyce J. Rares, dan Jericho D. Pombengi. Temuan menunjukkan bahwa, meskipun belum sempurna, Pemerintah kecamatan Wanea Kota Manado efektif dalam bidang produksi, efisiensi, kepuasan pegawai, kemampuan beradaptasi atau fleksibilitas, dan pengembangan. Peningkatan kuantitas dan kualitas program dan kegiatan dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia, anggaran dan dana, efisiensi fasilitas kerja, dan apresiasi karyawan adalah beberapa saran perbaikan.²⁰

Penelitian ketiga *“Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”* dilakukan oleh Lailina Jamilah, Nurul Umi Ati, dan Suyeno. Berdasarkan temuan penelitian, Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pelayanan Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama sudah menunjukkan bahwa kinerja pegawai sudah efektif dalam memenuhi komponen standar pelayanan. Penerapan yang efektif dari dua komponen standar layanan, yaitu: komponen standar layanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan dan proses manajemen layanan (atau manufaktur). khususnya pemanfaatan SIMKAH sistem informasi pernikahan dan tersedianya program pelatihan karyawan yang sesuai. Lingkungan kerja yang kondusif, motivasi kerja yang tinggi, personel yang berkualitas, dan disiplin kerja yang tinggi merupakan faktor-

²⁰ Vicky Switly Toad, Joyce J Rares, and Jericho D Pombengi, “Efektivitas Organisasi Pemerintah Kecamatan Wanea Kota Manado,” n.d.

faktor yang mendukung kinerja karyawan. Sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta kurangnya sumber daya manusia yang menjadi faktor penghambat.²¹

Irwan Tahir melakukan penelitian keempat yang berjudul “*Model Efektivitas Organisasi Pemerintahan Desa*”. Kepemimpinan, kewenangan, struktur organisasi, sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana, manajemen dan budaya organisasi sebagai faktor internal, faktor kebijakan pemerintah supra desa, pembinaan dan pengawasan, serta pelibatan masyarakat sebagai faktor eksternal, semuanya turut andil dalam kegagalan pencapaian efektivitas pelayanan pemerintah desa.²²

Penelitian kelima berjudul “*Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor (Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende)*” penelitian dilakukan oleh Irma Fatrunisah, Afifuddin, dan Suyeno. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kinerja pegawai dalam memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan melalui Kepmen PAN-RB no. 15 di Dinas Perhubungan Ende per tahun 2014 sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan. Faktor yang mendukung : disiplin kerja, motivasi kerja. Faktor-faktor yang menghambat: kelengkapan alat tes, kurangnya personel, kurangnya keakraban operator angkutan dengan tes rutin, dan kurangnya dana untuk

²¹ Lailina Jamilah and Nurul Umi Ati, “Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)” XIII, no. 1 (2019): 40-51.

²² Irwan Tahir, “Model Efektivitas Organisasi Pemerintah Desa,” *Sosiohumaniora* 19, no. 3 (November 8, 2017), <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i3.13070>.

pendistribusian alat tes.²³

Berdasarkan pada literatur diatas, penulis menyimpulkan bahwa konsep yang digunakan berbeda dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya lebih banyak meneliti partisipasi masyarakat terhadap beberapa lembaga seperti PNPM, pembangunan infrastruktur, penggunaan anggaran dana desa, dan lain-lain di desa, sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas partisipasi masyarakat di lembaga BUMDes. Penelitian ini bersifat kebaruan karena dalam skala penulisan tesis, belum ada penelitian yang membahas topik ini khususnya BUMDes di Desa Banga. Selanjutnya penelitian ini penulis menawarkan konsep yang digunakan yaitu partisipasi masyarakat dan efektifitas organisasi sehingga menjadi pembeda dan bersifat kebaruan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori memuat prinsip-prinsip teori yang akan membantu penulis dalam membahas pokok bahasan yang sedang dibahas.²⁴

1. Teori Partisipasi

Menurut Slamet (1994:7), partisipasi adalah peranan seseorang atau kelompok dalam mewujudkan kebutuhan, perencanaan, dan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan, baik melalui pikiran maupun tindakan. Dalam buku Astuti (2011:61-63) Cohen dan Uphoff mengatakan bahwa partisipasi terdiri

²³ Irma Fatrunisah, "Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor (Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende)" Vol.15, no. No. 4 (2021): Hal: 30-38.

²⁴ Zaenal Arifin, *Dasar Penulisan Karya Ilmiah (Ed.4)* (Jakarta: Grasindo, 2008). 56.

dari empat bagian:

- a) Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan dimana gagasan dan masyarakat bekerja sama untuk menghasilkan alternatif-alternatif yang juga untuk kepentingan umum. Dengan menyalurkan ide, pendapat, atau argumentasi dalam forum rapat, maka partisipasi tersebut dilaksanakan.
- b) Partisipasi dalam pelaksanaan, khususnya partisipasi dalam kegiatan, penyaluran dana, pengembangan program, dan koordinasi pelaksanaan, yang kesemuanya memberikan kontribusi dalam mobilisasi sumber daya secara fisik.
- c) Partisipasi atas manfaat, khususnya mengambil bagian dalam tahap pelaksanaan dan hasil-hasilnya, seperti keluaran kegiatan dari segi kualitas dan persentase keberhasilan program (kuantitas).
- d) Partisipasi dalam evaluasi pada tahap ini, yang berkaitan dengan program yang direncanakan dan bertujuan untuk mengetahui capaian program.²⁵

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi pada dasarnya memiliki banyak definisi, beberapa ahli mengemukakan partisipasi masyarakat sebagai berikut:

- 1) Partisipasi melibatkan keinginan dan sikap seseorang dalam

²⁵ Lili Mulyawati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Melalui Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) (Studi Deskriptif Di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung)" (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021). 9-10.

organisasi. Hal ini mendorong orang untuk berpartisipasi dalam mencapai tujuan organisasi dan mengambil setiap tanggung jawab secara bersama.²⁶

- 2) Menurut R.A. Santoso Sastropetro yang dikutip oleh Isbandi, partisipasi diartikan sebagai keterlibatan pikiran dan perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mengajak mereka untuk membantu kelompok dalam mencapai tujuannya dan berbagi tanggung jawab atas usaha yang bersangkutan.²⁷
- 3) Hetifah Soemanto berpendapat bahwa partisipasi masyarakat adalah proses ikut serta dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan individu, kelompok sosial, dan organisasi.
- 4) Menurut Loekman Soetrisno, partisipasi adalah ketika masyarakat dan pemerintah bekerja sama merencanakan, melaksanakan, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan.²⁸
- 5) Menurut Adasasmita, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat setempat berkaitan dengan partisipasi masyarakat.²⁹

²⁶ Inu Kencana, *Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). 132.

²⁷ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 2008). 107.

²⁸ Loekman Soetrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif* (Yogyakarta: Kanisius, 1995). 20.

²⁹ Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). 44.

- 6) Isbandi mengutip Mikkelsen mengatakan bahwa partisipasi adalah terlibat dalam masyarakat untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, lingkungannya, dan dirinya sendiri.³⁰
- 7) Menurut Dedi Supriadi dan Fasli Djalal, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam penyebaran pendapat, gagasan, produk, jasa, dan keterampilan. Kelompok yang berpartisipasi juga mengetahui masalah mereka sendiri, mempertimbangkan pilihan mereka, membuat keputusan, dan menemukan solusi untuk masalah tersebut.³¹
- 8) Menurut H. A. R. Tilaar yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah keinginan untuk menumbuhkan demokrasi melalui desentralisasi dan perencanaan dari bawah ke atas dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan masyarakat.³²

Dengan demikian partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam suatu program, menurut beberapa penjelasan di atas. Pelibatan dan partisipasi masyarakat selama proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan disebut sebagai partisipasi masyarakat. Oleh karenanya masyarakat Desa Banga harus menyadari pentingnya peran serta masyarakat dalam berjalannya program Badan Usaha

³⁰ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 2008). 107.

³¹ Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah* (2001: Adicita Karya Nusa, Yogyakarta).

³² H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan Dan Pendidikan Kajian Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan* (Jakarta: Rinika Cipta, 2009).

Milik Desa (BUMDes), maka seseorang dikatakan berpartisipasi apabila masyarakat atau kelompok masyarakat di wilayahnya terlibat aktif dalam program tersebut.

b. Manfaat Partisipasi Masyarakat

Olsen dan Freudenburg yang dikutip Isbandi menyebutkan “beberapa keuntungan yang bisa diperoleh melalui keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan. Keunggulan tersebut antara lain kontribusi yang tulus terhadap demokrasi, peningkatan komunikasi dan pemahaman masyarakat di antara para peserta, serta terjadinya pengambilan keputusan yang efektif sehingga terjadi keseimbangan posisi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat dapat membangun legitimasi yang dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pemerintah”.³³

Isbandi mengutip Westra yang mengatakan bahwa “salah satu keuntungan berpartisipasi adalah kesempatan untuk membuat keputusan yang tepat dan kemampuan berpikir kreatif bersama masyarakat”³⁴. Selain itu, Conyers mengutip tiga alasan berikut untuk pentingnya keterlibatan masyarakat:

- 1) Jika seseorang terlibat dalam proses pembangunan, mereka memiliki hak demokratis untuk berpartisipasi.
- 2) Partisipasi adalah suatu cara untuk memperoleh informasi tentang

³³ *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, 2008. 101.

³⁴ Conyers, Diana, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994). 34.

kondisi, sikap, dan kebutuhan masyarakat setempat tanpa partisipasi masyarakat, suatu proyek atau program pembangunan akan gagal.

- 3) Jika masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang suatu proyek atau program pembangunan dan akan lebih percaya terhadapnya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat partisipasi masyarakat untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, terjalinnya komunikasi yang efektif antara masyarakat dengan pemerintah, dan dorongan masyarakat untuk memupuk kepentingan bersama. Dengan demikian, masyarakat secara keseluruhan akan memperoleh manfaat dari pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

c. Proses Partisipasi

Uphoff menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilihat pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.³⁵ Beberapa proses partisipasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan

Sigiarto dan Wicaksono dikutip oleh Nyoman Sumaryadi³⁶ menyatakan bahwa perencanaan partisipatif merupakan usaha masyarakat untuk menyelesaikan probelem yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri. Ciri-

³⁵ Uphoff, N, *Local Institutions and Participation for Sustainable Development* (London: Iied, 1992). 15.

³⁶ I Nyoman Sumaryadi, *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah* (Jakarta: Citra Utama, 2010). 65.

ciri perencanaan partisipatif yang dikemukakan oleh keduanya adalah sebagai berikut³⁷:

a) Berkonsentrasi pada kebutuhan masyarakat

Perencanaan program didasarkan pada masalah dan kebutuhan masyarakat, dan perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, yang mengedepankan keterbukaan dan kepercayaan di antara anggota.

b) Partisipatif (keterlibatan)

Melalui forum-forum pertemuan, masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menyumbangkan ide tanpa batasan ucapan, waktu, atau tempat.

c) Dinamis

Perencanaan dinamis bersifat proaktif dan berkelanjutan, serta memperhatikan kebutuhan dan kepentingan semua pihak.

d) Sinergi:

Memastikan semua pihak terlibat dan menekankan kerja sama dengan wilayah dan wilayah administratif. Interaksi antar pemangku kepentingan diperhitungkan dalam setiap rencana yang akan dikembangkan, selengkap mungkin untuk melengkapi apa yang sudah ada, sedang dibangun, atau akan dibangun.

e) Legalitas

³⁷ *Ibid.*

Perencanaan pembangunan memperhatikan semua peraturan yang berlaku. menjunjung tinggi moral dan nilai-nilai masyarakat serta mencegah peluang penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.

f) Fisibilitas

Proses perencanaan kelayakan harus terukur, spesifik, dan berbasis waktu.

Pentingnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Masyarakat tidak hanya dilihat sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek dalam program karena pentingnya peran serta masyarakat dalam perencanaan. Hasil dapat bermanfaat bagi masyarakat ketika perencanaan berpusat pada partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, mereka akan merasa bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dan dapat memantau pelaksanaannya.³⁸ Oleh karena itu masyarakat diharapkan harus mempunyai rasa tanggung jawab dan mau terlibat dalam kegiatan berikutnya.

2) Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dilaksanakan untuk melakukan kegiatan sesuai rencana. Keberhasilan suatu program bergantung pada partisipasi masyarakat dalam semua kegiatan. Pembagian yang adil atas sumbangan masyarakat kaya dan miskin dalam bentuk uang, tenaga, gagasan, keterampilan, dan bentuk pengorbanan lainnya yang sebanding dengan

³⁸ St. Rodliyah, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan....* 82.

keuntungan yang akan diterima setiap masyarakat dikenal dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan.³⁹

Koentjaraningrat menegaskan bahwa masyarakat dapat dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek pembangunan dengan menyediakan tenaga untuk proyek-proyek tertentu, biasanya yang bersifat fisik.⁴⁰ Berdasarkan penjelasan di atas, pelaksanaan program dapat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Dalam prakteknya, masyarakat diperlihatkan program yang sedang berjalan, namun diharapkan masyarakat juga menjadi penggerak pelaksanaannya.

Kemauan dan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi merupakan sumber partisipasi. Secara individu atau kelompok, partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan. Dengan berorganisasi, kelompok masyarakat dapat mengatur pelaksanaan program secara terstruktur. Ross Murray mengatakan bahwa pengorganisasian adalah cara komunitas untuk mencari tahu apa yang dibutuhkan, memprioritaskannya, dan merasa cukup percaya diri untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menggunakan skala prioritas yang didasarkan pada sumber daya yang sudah ada di komunitas dan di luarnya untuk bekerja sama.⁴¹ Karena sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program, maka kelompok-kelompok yang dibentuk harus berusaha sedapat mungkin mewakili semua bagian dan

³⁹ Rahayu Kristiniati Dan Ilmi Usrotin Choiriyah, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Di Desa Bligo Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik* 2, no. 2 (2014).

⁴⁰ I Nyoman Sumaryadi, *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*....55.

⁴¹ Agus Afandi, *Metodologi Partisipatory Action Research*.....92.

benar-benar mewakili masyarakat.

3) **Partisipasi Masyarakat pada Evaluasi**

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini memungkinkan kritik dan saran diberikan untuk memastikan bahwa itu sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diinginkan.⁴² Pada titik ini, keterlibatan masyarakat dapat memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana.

Meskipun proses evaluasi melibatkan evaluasi semua pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam pengelolaan program, evaluasi partisipatif dilakukan oleh pihak ketiga yang independen dan berkompeten. Solekhan mengutip Goulet yang mengatakan bahwa peserta bisa datang dari atas (penguasa atau ahli), bawah (masyarakat), atau dari luar⁴³. Fakta aktual menunjukkan bahwa pemrakarsa dari penguasa lebih menonjol dibandingkan dengan pemrakarsa dari masyarakat atau dari bawah. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk ideal partisipasi yang sulit dicapai dalam praktiknya adalah partisipasi yang dimulai dari level paling bawah dan naik ke level tertinggi menuju ranah pengambilan keputusan yang semakin luas.⁴⁴

2. **Teori Efektivitas Organisasi**

Konsep efektivitas mencakup berbagai faktor internal dan eksternal. Gagasan tentang keefektifan ini tidak dilihat secara terpadu. Hal ini karena berbagai pendekatan disiplin ilmu diperhitungkan, sehingga menghasilkan

⁴² Mohammad Mulyadi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*.....43.

⁴³ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi*..... 94

⁴⁴ *Ibid.* 114.

konsep pengukuran yang beragam. Namun, banyak juga para ahli dan peneliti yang mengungkapkan apa itu metrik efektivitas dan bagaimana cara menghitungnya.

Para ahli menawarkan definisi dan perspektif dalam kaitannya dengan efektivitas organisasi:

- a) Menurut Amitai Etzioni: “Efektivitas organisasi dapat didefinisikan sebagai sejauh mana suatu organisasi mencapai tujuan atau sasarannya”.⁴⁵
- b) Menurut Komaruddin: “Efektivitas juga merupakan kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.
- c) The Liang Gie berpendapat bahwa “Efektivitas suatu pekerjaan adalah sejauh mana ia memenuhi tujuan dan manfaat yang diinginkan.”⁴⁶
- d) Menurut Gibson: ‘Efektifitas dalam konteks perilaku organisasi hubungan antara kualitas, produksi, efisiensi, kepuasan pelanggan, kemampuan beradaptasi, keunggulan, dan pertumbuhan’.⁴⁷
- e) Soekarno K. Berpendapat bahwa “Efektif berarti mencapai tujuan seseorang atau mencapai hasil yang diinginkan seseorang terlepas dari jumlah waktu, uang, tenaga, alat, atau sumber daya lain yang

⁴⁵ Amitai Etzioni, *Organisasi-Organisasi Modern* (Jakarta: UI Press, 1985). 54.

⁴⁶ The Liang Gie, *Dasar-Dasar Administrasi, Suatu Kumpulan Karangan Di Daerah* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000). 24.

⁴⁷ James L Gibson, *Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1985). 28.

digunakan”⁴⁸.

Efektivitas organisasi yang telah didefinisikan para ahli menunjukkan bahwa tujuan dan hasil yang diinginkan sendiri menentukan prioritas efektivitas. Oleh karena itu, pencapaian tujuan atau hasil yang dilakukan oleh setiap individu secara kolektif merupakan ukuran efektivitas kinerja organisasi. Karena dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, pendapat para ahli di atas menunjukkan bahwa efektivitas merupakan konsep yang sangat penting.⁴⁹

Keterlibatan, kemampuan beradaptasi, misi, dan konsistensi budaya organisasi semuanya berdampak pada efektivitasnya organisasi, berikut ini peneliti akan menjelaskannya lebih terperinci

A. Keterlibatan (*Invovelment*)

Keterlibatan adalah perlakuan yang membuat orang merasa menjadi bagian dari kegiatan organisasi untuk meminta pertanggungjawaban orang atas tindakan mereka.⁵⁰ Partisipasi adalah kebebasan (atau kemandirian) yang dimiliki setiap orang untuk menyuarakan pendapatnya.

Selama dikaitkan dengan ide-ide untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan atau organisasi, keterlibatan juga harus dihargai oleh kelompok dan pemimpin organisasi. Pemberdayaan, kerjasama tim

⁴⁸ Soekarno K., *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Miswar, 1986). 42.

⁴⁹ Bagus Julianto dan Tommy Yunara Agnanditiya Carnarez, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Organisasi Profesional: Kepemimpinan, Komunikasi Efektif, Kinerja Dan Efektivitas Organisasi (Suatu Kajian Studi Literature Review Ilmu Manajemen Terapan),” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, Issue 5 (Mei 2021).

⁵⁰ Daniel Denison dan Aniel K Mishra, “Organizational Culture and Organizational Effectiveness,” *Organization Sceince* 6 (Maret-April): no 2.

(Team Orientation), dan pengembangan kapabilitas adalah tiga indikator keterlibatan.

B. Adaptasi (*adaptation*)

Kemampuan beradaptasi adalah kapasitas organisasi untuk menginterpretasikan dampak lingkungan terhadapnya. Kapasitas organisasi untuk beradaptasi adalah kapasitasnya untuk beradaptasi secara internal sebagai respons terhadap perubahan lingkungan eksternal.

Menurut Denison dan Mirsha dalam Casida,⁵¹ tiga indikator kemampuan beradaptasi adalah perubahan (*Creating Change*), fokus pasien (*Customer Focus*), dan kondisi organisasi (*Organizational Learning*).

C. Misi (*Mission*)

Misi adalah dimensi budaya yang menunjukkan tujuan mendasar organisasi, yaitu mempersatukan anggotanya dan berkonsentrasi pada apa yang dianggap penting oleh organisasi. Denison mengatakan bahwa jika suatu organisasi tidak menjalankan misinya, masyarakat tidak akan tahu apa yang harus dilakukan dan tujuan jangka panjangnya tidak akan jelas.⁵²

Sementara itu, Denison dan Misha menyatakan bahwa tiga indikator arah dan maksud strategis, tujuan dan sasaran, dan visi dapat digunakan untuk menilai misi perusahaan.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Denison, D.R., *Corporate Culture and Organizational Effectiveness*, 2006.

D. Konsistensi

Sejauh mana para anggota organisasi menyetujui asumsi fundamental dan nilai-nilai inti organisasi disebut konsistensi. Konsistensi menekankan pada keyakinan, nilai, dan simbol organisasi, serta pelaksanaan aktivitas yang terkoordinasi, yang dipahami dan dipatuhi oleh anggota.

Rasa memiliki masyarakat, adanya nilai-nilai kunci, dan kejelasan tentang tindakan yang dapat diambil merupakan indikator konsistensi organisasi. Salah satu aspek yang berkontribusi terhadap kekuatan dan stabilitas organisasi adalah konsistensi. Demison dan Mirsha menyatakan bahwa konsistensi harus terlihat dari 3 (tiga) petunjuk yaitu prinsip pedoman, pengertian, koordinasi dan kebersamaan.⁵³

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Studi kasus BUMDes “Kuling Kaboi” Desa Banga di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah dijadikan sebagai subjek penelitian yang bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial. Menurut buku Mahi M. Hikmat, Chaedar Alwasilah, metode kualitatif adalah prosedur penelitian berdasarkan penyampaian verbal dari individu, perilaku

⁵³ *Ibid.* 168.

yang dapat diamati, dan kalimat tertulis.⁵⁴

2. Lokasi Penelitian

Badan Usaha Milik Desa “Kuling Kaboi” di Desa Banga Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah menjadi tempat penelitian ini. Desa ini dipilih karena pada tahun 2020 pengelolaan BUMDes akan menjadi yang terbaik di Kabupaten Buton Tengah. Selain itu, desa tersebut memiliki beberapa program BUMDes yang dikelola, seperti penyewaan tenda dan kursi, pencetakan batu bata, dan penyediaan transportasi.

3. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan *sampel purposive sampling* (pengambilan sampel berdasarkan tujuan) yang disebut juga dengan metode pengambilan sampel berdasarkan kapasitas dan kapabilitas atau mereka yang benar-benar ahli di bidangnya. Informan penelitian ini antara lain:

Tabel 1.1 Daftar Informan Penelitian

No	Nama Informan	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Keterangan
1	RN	53	L	SMA	Kepala Desa Banga
2	HM	52	P	SMA	Ketua BPD Desa Banga
3	YN	40	L	SMA	Direktur BUMDes
4	EB	31	L	SMA	Bendahara BUMDes
5	EF	37	L	SMP	Anggota BUMDes
6	LM	35	L	SMA	Anggota BUMDes

⁵⁴ Mahi M Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). 37.

7	WH	41	L	SMP	Nelayan
8	MD	30	L	S1	Pemuda
9	MN	38	L	S1	Wiraswasta
10	SM	44	P	SMP	IRT
11	AS	51	P	SMA	Kader posyandu
12	HL	42	P	SMA	IRT

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial pada BUMDes “Kuling Kaboi” di Desa Banga Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah menjadi obyek penelitian dan pokok bahasan penelitian ini.

4. Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode yang dikenal dengan “purposive sampling”. *Purposive Sampling* ini dilakukan sebelum pelaksanaan penelitian, dimana peneliti menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh para informan. Peneliti telah mengetahui identitas informan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan tersebut.⁵⁵ Adapun kriterianya antara lain: sehat jasmani dan rohani, memiliki pemahaman terkait objek pertanyaan, merasakan pengalaman secara langsung di Desa Banga, mau dan bersedia menjadi informan penelitian, mereka yang memiliki waktu ketika dimintai informasi.

Orang-orang yang dibutuhkan penelitian ini sebagai informan, adalah sebagai berikut; Kepala Desa Banga, Ketua Badan Permusyawaratan Desa,

⁵⁵ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Depok: Rajawali Press, 2014). 141.

Direktur BUMDes, Bendahara BUMDes, Anggota BUMDes dan beberapa warga yang ada di Desa Banga.

5. Teknik Pengumpulan Data

A. Pengamatan atau Observasi

Kegiatan mengamati pola atau gejala di lokasi penelitian disebut dengan teknik observasi atau observasi. Menurut Malhotra dari Sugiyono, teknik observasi dilakukan dengan cara mencatat dan mengamati secara metodis pola tingkah laku orang, benda, atau sejumlah peristiwa.⁵⁶ Pengamatan ini dilakukan langsung di hadapan warga masyarakat Desa Banga. Observasi pasif digunakan sebagai metode observasi dalam penelitian ini. Pengamatan pasif adalah metode di mana pengamat langsung ke aktivitas subjek tetapi tidak berpartisipasi langsung di dalamnya. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian di BUMDes “Kuling Kaboi” Desa Banga.

Dalam kegiatan observasi ini, peneliti menelaah data dan informasi secara detail sebagai berikut:

- 1) Proses pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program BUMDes.
- 2) Mencermati pengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan program BUMDes
- 3) Jenis-jenis usaha BUMDes

⁵⁶ Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005). 37.

B. Wawancara

Wawancara adalah format tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer), yang bertanya dan orang yang diwawancarai (interviewee), yang menanggapi pertanyaan tersebut guna memperoleh beberapa informasi yang diperlukan. Peneliti memilih individu untuk digunakan sebagai informan untuk wawancara. Tujuan dari wawancara semi terstruktur yang peneliti lakukan dengan informan adalah untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan subjek penelitian. Metode wawancara bebas terbimbing digunakan untuk wawancara dalam penelitian ini. Kerangka pertanyaan terstruktur dengan baik, namun pewawancara dapat mengembangkan sendiri pertanyaannya selama tidak menyimpang dari topik yang diberikan.

Pengumpulan data disesuaikan dengan keadaan pengamatan dan pemilihan informan yang disengaja. Pengetahuan informan tentang situasi penelitian dipantau untuk membuat keputusan. Beberapa pihak yang memberikan informasi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepala Desa Banga, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Direktur BUMDes, Bendahara BUMDes, Anggota BUMDes dan warga Desa Banga yang ikut berpartisipasi dalam musyawarah BUMDes serta yang pernah terlibat dalam transaksi jenis usaha BUMDes..

C. Dokumentasi

Dalam penelitian, dokumentasi merupakan metode yang diperlukan untuk mengumpulkan data sekunder. Sumber daya

berwujud yang diberikan kepada peneliti dalam bentuk dokumen tertulis, gambar, atau film disebut dokumentasi. Selain itu, studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang disediakan oleh lembaga objek penelitian. Materi tersebut dapat berupa prosedur, peraturan, catatan penelitian, gambar, atau laporan kerja, serta foto atau dokumen elektronik (rekaman).⁵⁷

Sebagai bukti pelaksanaan penelitian ini, diperoleh berkas-berkas mengenai kondisi geografis desa, profil BUMDes, SK pendirian, dan laporan hasil usaha BUMDes, serta foto-foto yang diambil selama proses wawancara sebagai dokumentasi.

6. Teknik Analisis Data

A. Reduksi Data

Catatan-catatan tersebut direduksi dengan menyusun secara sistematis, mengarahkan, membuang secara rapi data-data yang tidak diperlukan, dan menyajikan pokok-pokok data penelitian sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data digunakan untuk menelaah data yang diperoleh melalui pencatatan di lapangan.⁵⁸

Tahap reduksi ini merupakan tahap pertama dalam melakukan analisis data agar dapat membantu peneliti memaknai data yang diperoleh. Reduksi data juga dilakukan dengan cara mengumpulkan

⁵⁷ Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014). 61.

⁵⁸ Muharto dan Arisandy Ambarita, *Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa Dalam Menyusun Proposal Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2012). 92.

dan menyeleksi semua data yang masuk baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah tersebut agar lebih bermakna. Dalam hal ini, peneliti telah mereduksi data terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes serta efektivitas penyelenggaraan program BUMDes Kuling Kaboi.

B. Penyajian Data

Proses pengorganisasian data secara sistematis sesuai dengan pertanyaan wawancara dan fokus penelitian dikenal dengan istilah penyajian atau deskripsi data. Setelah itu, inisial informan digunakan untuk mencantumkan nama mereka untuk melindungi privasi mereka sendiri.⁵⁹

Data disajikan melalui analisis dan naratif, kemudian dikumpulkan dan diinterpretasikan secara sistematis agar kalimat dan kata lebih detail, jelas dan lengkap. Informasi disajikan dengan cara yang lebih mudah agar dapat dipahami dengan baik, sehingga pekerjaan selanjutnya dapat direncanakan berdasarkan pemahaman tersebut.⁶⁰

C. Menarik Kesimpulan

Di awal proses pengumpulan data, penulis perlu memahami makna dari hal-hal yang mereka temui dengan mencatat aturan, pola,

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010). 250.

pernyataan, kemungkinan konfigurasi, arah sebab akibat, dan berbagai proporsi. Hal ini akan memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan.

Pada tahap ini, penulis tidak hanya merekonsiliasi apa yang dirumuskan dalam referensi teoritis, tetapi juga berkolaborasi dengan pengetahuan aktual dilapangan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai antara teori dan realitas lapangan, sehingga dalam penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi fokus penelitian.

7. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, data dicek dengan menggunakan triangulasi sumber, yang meliputi pengecekan data yang telah diperoleh maupun pengecekan dengan sumber yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara, meninjau data, dan kemudian mewawancarai informan tambahan sekali lagi. Catatan-catatan yang didapatkan dari lokasi penelitian tersebut direduksi dengan cara menyusun, mengarahkan, merapikan, memisahkan data-data yang tidak perlu, dan menampilkan pokok-pokok data penelitian secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data digunakan untuk menelaah data yang diperoleh melalui catatan lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan alur pembahasan dan sistematika pembahasan, penyusunan pembahasan disusun secara sistematis menjadi beberapa bagian:

1. Judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan semuanya tercakup dalam pendahuluan yaitu pada Bab I.
2. BAB II Gambaran umum obyek penelitian, khususnya BUMDes Kuling Kaboi dan Desa Banga ditinjau dari sejarah, lokasi, struktur pengelolaan, program, dan sumber daya manusia.
3. Pembahasan pada BAB III difokuskan pada rumusan masalah dan jawaban atas pertanyaan penelitian. Efektifnya program BUMDes Kuling Kaboi Desa Banga dan proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial menjadi topik bahasan utama dalam bab ini.
4. Penutup pada BAB IV, berisi saran dan kesimpulan terkait temuan penelitian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang sudah dipaparkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses partisipasi masyarakat di Desa Banga sangat antusias dalam upaya pembangunan sosial melalui BUMDes Kuling Kaboi, hal ini terlihat dari kegiatan masyarakat yang ikut terlibat dalam setiap kegiatan BUMDes mulai dari tahap pembentukan, perencanaan program, pelaksanaan dan evaluasi, sehingga program berjalan dengan baik dan solid karena ada kerja sama yang baik antara pemerintah desa, pengurus BUMDes dan masyarakat itu sendiri.

Ada 3 proses partisipasi masyarakat yaitu partisipasi pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketiga proses partisipasi masyarakat di Desa Banga melalui program BUMDes Kuling Kaboi sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat pada perencanaan, adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program BUMDes Kuling Kaboi. partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat sudah dianggap sebagai subjek program bukan hanya objek dari program BUMDes sehingga manfaat dan hasil dari rancangan tersebut dinikmati dan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri selain itu masyarakat Desa Banga juga ikut terlibat dalam pengambilan keputusan hal ini memungkinkan masyarakat terus memantau jalannya program BUMDes.

2. Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Banga benar-benar ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan program BUMDes Kuling Kaboi, disetiap proses pelaksanaannya, karena ada rasa tanggung jawab dari masyarakat terhadap kemajuan desa dan juga kebermanfaatannya untuk semua lapisan masyarakat Desa Banga melalui jenis usaha yang ada di BUMDes Kuling Kaboi.
3. Partisipasi masyarakat pada evaluasi, menunjukkan bahwa ada keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi program BUMDes Kuling Kaboi di Desa Banga, baik dalam bentuk keikutsertaan dalam musyawarah evaluasi anggaran setiap semester, rapat evaluasi tahunan untuk membahas kinerja pengurus, pengembangan usaha atau lembaga, dan juga evaluasi secara langsung yakni memberikan masukan pada saat pelaksanaan.

Efektivitas penyelenggaraan program BUMDes Kuling Kaboi

diantaranya sebagai berikut:

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan BUMDes Kuling Kaboi, terlihat dari upaya yang dilakukan pengurus BUMDes Kuling Kaboi untuk melibatkan masyarakat baik dari kalangan pemuda maupun masyarakat secara umum khususnya mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Masyarakat dan semua stakeholder saling bekerja sama dalam setiap proses penyelenggaraan BUMDes Kuling Kaboi di Desa Banga baik dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan,

pelaksanaan sampai pada proses evaluasi sehingga berjalan dengan efektif. Upaya peningkatan kompetensi ini belum dilakukan secara bertahap dan juga belum secara merata kepada semua pengurus BUMDes.

2. Adaptasi BUMDes terhadap persaingan jenis usaha terlihat dari upaya yang dilakukan pengurus BUMDes dalam menghadapi persaingan usaha yang semisal dengan melakukan promosi masif kepada semua masyarakat dan dengan menawarkan harga yang terjangkau. Upaya ini dilakukan dengan cara memberikan pelayanan cepat seperti misalnya masyarakat yang ingin membeli batako langsung diantar dengan cepat dan tepat waktu. Namun belum ada upaya yang dilakukan pengurus BUMDes untuk melakukan kreativitas dalam jenis usaha yang sedang dijalankan. Hal ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor internal BUMDes itu sendiri yaitu soal Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Misi BUMDes Kuling Kaboi dalam Pembangunan Desa Banga terlihat dari Strategi yang dilakukan pemerintah dengan memanfaatkan kultur budaya yaitu kekeluargaan dan kebersamaan agar kedepan setiap potensi dan keunggulan desa bisa dieksplor oleh BUMDes hal ini tentunya akan butuh dukungan besar dari masyarakat untuk kesejahteraan mereka sendiri serta akan meningkatkan pendapatan pengelolaan BUMDes sehingga porsi pembangunan Desa bisa lebih besar sehingga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat

sehingga jenis usaha yang akan dikembangkan kedepan akan lebih banyak lagi terutama di sektor pertanian, kelautan, dan galian tambang C (batu kapur).

4. Konsistensi pengurus BUMDes dalam menjalankan usaha terlihat dari penilaian penting yang menjadi nilai kolektif dari semua anggota pengurus dan bahkan menjadi nilai di tengah masyarakat yaitu kekeluargaan dan kebersamaan demi kesejahteraan bersama. Inilah yang menjadi nilai dasar yang menopang dan tertanam sehingga pengurus dan masyarakat secara umum saling bantu membantu untuk kemajuan Desa Banga serta adanya koordinasi yang dilakukan oleh semua elemen pemerintah desa dan pengurus BUMDes serta Badan Permusyawaratan Desa dapat terlihat dari progres ketercapaian program yang berjalan sesuai rencana. Peneliti memandang bahwa program yang dilaksanakan sudah berjalan sesuai dengan rencana dibawah koordinasi bapak Rusani selaku Kepala Desa Banga.

B. Saran

Ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian tesis ini berdasarkan temuan penelitian. Tesis ini menawarkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Diharapkan pengelolaan BUMDes Kuling Kaboi mampu memperluas dan memperkuat peran warga Desa Banga antara lain dengan meningkatkan kinerja sumber daya pengelolaan dan unit usaha secara maksimal.

2. Dengan melakukan pengawasan, pendampingan, dan pendampingan, diharapkan BUMDes dapat lebih berperan dan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada desa maupun warga desa. Pemerintah Desa Banga juga diharapkan memberikan perhatian khusus pada penguatan dan pengembangan BUMDes.
3. Diharapkan peneliti selanjutnya lebih berkontribusi kepada masyarakat dengan memberikan solusi. Selain itu, diharapkan temuan penelitian ini dapat menjadi referensi atau sumber bahan untuk mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pembangunan sosial dan ekonomi di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam Latif, Irwan, Muhammad Rusdi, Ahmad Mustanir, Muh Sutrisno. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal MODERAT* 5 no. 1 (February 2019): 1–15.
- Agus Afandi. *Metodologi Partisipatory Action Research*, n.d.
- Amitai Etzioni. *Organisasi-Organisasi Modern*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Andi Mappadjantji Amien. *KEMANDIRIAN LOKAL: Konsepsi Pembangunan, Organisasi Dan Pendidikan Dai Prespektif Sains Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Aziz Muslim. *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2012.
- Badan Pusat Statistik. "Http://Ipm.Bps.Go.Id," n.d.
- Conyers, Diana. *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
- Daniel Denison dan Aniel K Mishra. "Organizational Culture and Organizational Effectiveness." *Organization Sceince* 6 (Maret-April): no 2.
- Dantika Ovi Eratama, Yanuardi. "Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul." *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*, 2013.
- Denison, D.R. *Corporate Culture and Organizational Effectiveness*, 2006.
- Drolet, J. L. & Sampson, T. *Addressing Climate Change from a Social Development Approach: Small Cities and Rural Communities' Adaptation and Response to Climate Change in British Columbia*. Canada: International Social Work, 2014.
- Edi Suharto. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta cetakan keenam, 2012.
- . *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Reflika Aditama cetakan kedua, 2006.

- Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, Darwanto Darwanto. "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)." *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 13, no. 1 (2016).
- Fatrunisah, Irma. "Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor (Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende)" 15, No. 4 (2021): 30-38.
- Hanny Purnamasari, Eka Yulyana, Rachmat Ramdani. "Efektivitas Pengelolaan BUMDes Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Desawarung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang." *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2016.
- H.A.R. Tilaar. *Kekuasaan Dan Pendidikan Kajian Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rinika Cipta, 2009.
- Hetifah Sj Sumarto. *Inovasi, Partisipasi, Dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- I Nyoman Sumaryadi. *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama, 2010.
- . *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*, n.d.
- Inu Kencana. *Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Isbandi Rukminto Adi. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 2008.
- . *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 2008.
- . *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- . *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Social*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, 2002.
- Istijanto. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. 2001: Adicita Karya Nusa, Yogyakarta.

James L Gibson. *Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 1985.

Jamilah, Lailina, and Nurul Umi Ati. "Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)" XIII no. 1 (2019): 40-51.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2016.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.

Loekman Soetrisno. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

M. Djunaedi Ghony & Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Mahi M Hikmat. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Miftachul Huda. *Pekerjaan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009.

Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi*, n.d.

Mohammad Mulyadi. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*, n.d.

Muharto dan Arisandy Ambarita. *Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa Dalam Menyusun Proposal Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.

Rahardjo Adisasmita. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Rahayu Kristiniati Dan Ilmi Usrotin Choiriyah. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Di Desa Bligo Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik* Vol. 2, no. No. 2 (2014).

Ricky Wirawan, Mardiyono dan Ratih Nurpratiwi. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol. 4, No. 2 (2015).

Ryanti Tiballa. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur." *EJournal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2017).

- Soekarno K. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Miswar, 1986.
- St. Rodliyah. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan*, n.d.
- Sudharto P. Hadi. *Aspek Sosial Amdal*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sulastris Sardjo Dkk. *(Implementasi Model Evaluasi Formatif Program Pembangunan Sosial Befpps): Partisipasi Multipihak Dalam Evaluasi Program*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Suratmo Gunawan. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004.
- Tahir, Irwan. "Model Efektivitas Organisasi Pemerintah Desa." *Sosiohumaniora* 19, no. 3 (November 8, 2017). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i3.13070>.
- The Liang Gie. *Dasar-Dasar Administrasi, Suatu Kumpulan Karangan Di Daerah*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- Toad, Vicky Switly, Joyce J Rares, and Jericho D Pombengi. "Efektivitas Organisasi Pemerintah Kecamatan Wanea Kota Manado," n.d.
- Undang-Undang tentang Desa. No 6, 2014.
- Uphoff, N. *Local Institutions and Participation for Sustainable Development*. London: Iied, 1992.
- Yeni Fajarwati. "Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Padegangan Kecamatan Padegangan Kabupaten Tangerang." Serang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2016.
- Zaenal Arifin. *Dasar Penulisan Karya Ilmiah (Ed.4)*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Zulkarnain ridwan. "Payung Hukum Pembentukan BUMDes." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (September 2013): 356.